



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Nurul Husna¹, Dina Hermina²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari

e-mail: cusnanh@gmail.com¹, dinahermina@uin-antasari.ac.id²

Received 02-07-2024 | Revised 21-07-2024 | Accepted 30-12-2024

Abstract

Corruption is one of the main obstacles in development that harms not only economically, but also erodes the moral values of society. Anti-corruption education at the primary school level has an important role in shaping the character of the younger generation who uphold the values of honesty, integrity and responsibility. This research aims to analyze the implementation of anti-corruption education policies in primary schools through a literature study approach. Policies such as Law No. 19/2019 on KPK, South Kalimantan Governor Regulation No. 069/2020, and Banjarbaru Mayor Regulation No. 10/2020 are the main basis for the integration of anti-corruption education into the curriculum. The results show that strategic measures such as integrating anti-corruption materials in subjects, using interactive teaching methods, and cooperation between teachers and parents are effective in instilling anti-corruption values in students. Creative approaches, such as educational games, inspirational stories, and extracurricular activities, are able to motivate students to understand the adverse effects of corruption and foster ethical commitment. With well-planned and collaborative anti-corruption education, it is hoped that a generation with high integrity, able to fight corruption, and contribute to a just and transparent society will be formed.

Keywords: Anti-corruption education, primary school, integrity values, education policy.

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan yang merugikan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral masyarakat. Pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar melalui pendekatan studi pustaka. Kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2020 menjadi landasan utama dalam integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis seperti pengintegrasian materi antikorupsi dalam mata pelajaran, penggunaan metode pengajaran interaktif, dan kerja sama antara guru serta orang tua efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada siswa. Pendekatan kreatif, seperti permainan edukatif, cerita inspiratif, dan kegiatan ekstrakurikuler, mampu memotivasi siswa untuk memahami dampak buruk korupsi dan menumbuhkan komitmen etis. Dengan pendidikan antikorupsi yang terencana dan kolaboratif, diharapkan terbentuk generasi yang berintegritas

tinggi, mampu melawan korupsi, dan berkontribusi pada masyarakat yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Pendidikan antikorupsi, sekolah dasar, nilai-nilai integritas, kebijakan pendidikan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu hambatan utama bagi pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Korupsi telah menyebar luas, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Praktik korupsi menyebabkan kerugian besar dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat dengan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan kampanye publik yang meningkatkan kesadaran. Selain teori, implementasi pendidikan ini juga memerlukan praktik nyata, misalnya melalui transparansi dalam pengelolaan dana publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pendidikan antikorupsi menjadi langkah penting dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi sekaligus mengurangi jumlah kasus korupsi di masa depan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi sebagai agen perubahan. Pemerintah Indonesia, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bertugas memberantas korupsi secara profesional dan berkelanjutan. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki wewenang bebas dari intervensi kekuasaan. Meskipun demikian, korupsi tetap berkembang, mulai dari skala kecil hingga

yang merugikan negara. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, termasuk melalui pendidikan antikorupsi, sangat diperlukan.

Pendidikan antikorupsi di sekolah dasar sangat penting karena usia anak-anak merupakan masa pembentukan karakter. Anak-anak cenderung mudah menerima nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan mereka. Dengan mengenalkan konsep antikorupsi sejak dini, siswa diharapkan memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta mampu menolak perilaku koruptif. Pendidikan ini juga membantu mencegah sikap permisif terhadap korupsi yang sering kali berawal dari tindakan kecil, seperti ketidakjujuran. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat memahami dampak buruk korupsi dan menjadi lebih kritis terhadap perilaku yang tidak etis.

Salah satu kebijakan yang menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2020 menunjukkan komitmen untuk membentuk budaya antikorupsi melalui pendidikan formal, dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Sekolah berperan sebagai zona integritas yang mendukung pembentukan generasi bebas korupsi.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah bertanggung jawab tidak hanya pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial siswa. Pendidikan antikorupsi diintegrasikan dalam modul pembelajaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Penanaman nilai-nilai ini mencakup pengembangan karakter, sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa sejak dini. Dengan pendekatan kreatif, seperti permainan edukatif dan cerita inspiratif, siswa dapat lebih memahami dampak negatif korupsi serta pentingnya menjaga integritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas korupsi. Pendidikan antikorupsi yang diajarkan sejak dini diharapkan melahirkan generasi yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk melawan korupsi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar".

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan. Fokus penelitian ini adalah memahami strategi, dan efektivitas kebijakan pendidikan anti korupsi, termasuk peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 069 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2020. Proses penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap literatur untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah dasar. Informasi yang diperoleh kemudian disintesis untuk menyusun narasi ilmiah yang menggambarkan penerapan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan formal. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengembangkan strategi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dasar.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi pendidikan anti-korupsi di Sekolah Dasar (SD) secara teknis melibatkan beberapa langkah strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas dan kejujuran disampaikan dengan efektif kepada siswa. Menanamkan nilai anti-korupsi sejak dini adalah langkah krusial dalam membentuk karakter generasi mendatang yang jujur dan bertanggung jawab.¹ Dengan mengenalkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk memahami dampak buruk dari perilaku korupsi serta pentingnya menjunjung prinsip moral yang baik. Pendidikan anti-korupsi yang diterapkan melalui aktivitas sehari-hari, kurikulum sekolah, dan teladan dari orang dewasa membantu menanamkan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang perbedaan antara yang benar dan salah, tetapi juga melatih mereka untuk mengambil keputusan yang etis, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan berperan dalam menciptakan

¹ Imam Riyadi dkk, *Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.2, 2024

masyarakat yang lebih adil dan transparan di masa depan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi kurikulum

Materi mengenai anti-korupsi perlu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral atau Pendidikan Agama. Hal ini melibatkan memasukkan materi tentang kejujuran, tanggung jawab, dan konsekuensi korupsi ke dalam kurikulum, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan informasi secara terpisah, tetapi juga menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dalam konteks yang lebih luas.²

Penerapan kurikulum anti-korupsi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dilakukan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis, bertujuan agar nilai-nilai kejujuran dan integritas dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa sejak dini. Langkah awalnya adalah merancang rencana pembelajaran yang memasukkan materi anti-korupsi ke dalam mata pelajaran relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Moral. Dalam proses ini, tema-tema seperti kejujuran, tanggung jawab, dan dampak buruk korupsi disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan diintegrasikan ke dalam pelajaran. Selanjutnya, pengembangan modul khusus menjadi prioritas, dengan menyiapkan bahan ajar yang dirancang untuk menyampaikan prinsip-prinsip anti-korupsi secara efektif. Modul ini mencakup kegiatan interaktif dan studi kasus yang mempermudah siswa dalam memahami topik tersebut. Selain itu, pelatihan guru menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini. Guru perlu dibekali kemampuan untuk mengajarkan materi anti-korupsi secara efektif, menggunakan pendekatan yang tepat, dan mendorong diskusi konstruktif mengenai isu-isu etika.

2. Metode Pengajaran

Pendekatan yang inovatif dan interaktif memiliki peran penting dalam pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan metode seperti permainan peran, drama, atau simulasi yang memungkinkan siswa merasakan situasi yang melibatkan keputusan etis. Sebagai contoh, dengan bermain peran sebagai tokoh yang dihadapkan pada dilema

² Denda Ginanjar dkk, *Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities*, *Veteran Law Review*, Vol.6, No.2, 2023

moral, siswa dapat memahami dampak dari tindakan mereka serta pentingnya bertindak dengan integritas. Selain itu, cerita dan buku anak yang menyampaikan pesan anti-korupsi dapat menjadi sarana efektif untuk mengajarkan nilai-nilai ini dengan cara yang mudah dimengerti.

Dengan menetapkan aturan yang mendorong kejujuran dalam permainan, tugas, dan aktivitas kelas lainnya, siswa dapat belajar menerapkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Sebagai contoh, memberikan apresiasi kepada siswa yang menunjukkan perilaku jujur atau adil dalam kegiatan kelas dapat memperkuat pemahaman mereka sekaligus memotivasi untuk bertindak secara etis. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi sarana pembelajaran anti-korupsi, di mana siswa memiliki kesempatan lebih luas untuk mempraktikkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Contohnya adalah pembentukan klub kejujuran atau penyelenggaraan kompetisi terkait perilaku etis yang dapat memperkuat prinsip anti-korupsi di luar lingkungan kelas. Kegiatan seperti ini memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan dan merayakan perilaku yang mencerminkan kejujuran dan integritas. Sesi diskusi dan refleksi juga memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Dengan mengadakan diskusi rutin, siswa dapat berbagi pengalaman tentang penerapan kejujuran dan integritas, sekaligus merenungkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi semacam ini membantu siswa memahami arti penting nilai-nilai tersebut serta mendorong mereka untuk berpikir secara kritis terhadap tindakan mereka.³

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang lain bahwa pembelajaran berbasis Project Citizen berhasil menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian melalui kegiatan analisis masalah, penyusunan kebijakan, dan simulasi. Model ini menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah korupsi. Selain itu, model ini memberikan pengalaman bermakna yang membantu siswa menginternalisasi nilai-

³ Ujang Syarip Hidayat, *Implementation of Honesty Canteen Program As Character Education Strategy in Elementary Schools*, Baileo: Jurnal Sosial Humaniora, Vol.1, No.3, 2024

nilai moral untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.⁴

3. Kerjasama dengan Orangtua

Kerja sama antara orang tua dan guru dalam pendidikan anti-korupsi sangat penting. Sekolah dapat menyediakan materi tentang nilai-nilai anti-korupsi, memungkinkan orang tua untuk memperkuat ajaran ini di rumah, memastikan konsistensi dan menciptakan lingkungan yang mendukung yang menumbuhkan integritas dan kesadaran pada anak-anak. Sekolah dapat menyelenggarakan seminar atau workshop khusus untuk orang tua guna menjelaskan pentingnya mendukung nilai-nilai anti-korupsi di lingkungan rumah. Selain itu, kegiatan ini dapat memberikan informasi mengenai materi yang diajarkan di sekolah, sehingga orang tua dapat memperkuat pesan yang telah disampaikan kepada anak-anak mereka. Pendekatan ini membantu menciptakan keselarasan antara pendidikan di sekolah dan praktik di rumah.⁵ Kerja sama antara orang tua dan guru dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun lingkungan belajar yang konsisten dan efektif. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang terbuka hingga keterlibatan bersama dalam aktivitas pendidikan.

Komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru memegang peranan penting dalam penerapan pendidikan anti-korupsi. Keduanya perlu rutin berdiskusi mengenai tujuan, pendekatan, dan cara memperkuat pesan anti-korupsi baik di rumah maupun di sekolah. Sebagai contoh, guru dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang materi dan kegiatan terkait anti-korupsi di kelas, sementara orang tua dapat memberikan umpan balik atau berbagi situasi di rumah terkait perilaku etis anak.⁶

Selain itu, kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan anti-korupsi menjadi langkah strategis. Orang tua dan guru bisa bekerja sama menyelenggarakan seminar atau

⁴ Nandang Abdurohim dkk, *Implementation of Anti-Corruption Education of the PKn Subjects in Project Citizen-Based Learning*, Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, Vol.4, No.1, 2023

⁵ Shelly Nasya Putri dkk, *Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi*, Siyazah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.2, 2024

⁶ Maman Rachman dkk, *Effective Communication Strategies between Teachers and Parents through a Collaborative Approach to Improve Student Achievement in Primary Schools*, Jurnal Dirosah Islamiyah (Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor), Vol.6, No.3, 2024

workshop tentang kejujuran dan integritas, serta strategi mengajarkan nilai-nilai tersebut di rumah. Mereka juga dapat membuat proyek bersama, seperti kampanye atau poster tentang kejujuran, yang melibatkan siswa, orang tua, dan guru. Membangun rutinitas dan aturan yang konsisten di rumah dan sekolah juga penting untuk mendukung nilai-nilai anti-korupsi. Orang tua dan guru perlu menyepakati aturan yang menegaskan kejujuran dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, orang tua menciptakan lingkungan yang menekankan pentingnya kejujuran di rumah, sedangkan guru menerapkan aturan serupa di kelas. Akhirnya, memberikan umpan balik dan penghargaan secara konsisten dapat memperkuat nilai-nilai ini. Koordinasi antara orang tua dan guru dalam memberikan pujian atau hadiah kecil untuk perilaku jujur dapat memotivasi anak untuk terus menjunjung kejujuran dan integritas.⁷

4. Menanamkan Sikap Jujur, Adil, Berani dan Disiplin

Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran wajib dalam kurikulum merdeka. Pelajaran ini berisi materi yang mendorong siswa untuk menjauhi segala bentuk penghinaan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membangun kesadaran warga negara agar dapat mengamalkan nilai-nilai luhur dan memiliki komitmen terhadap tujuan bersama, yaitu membentuk kepribadian yang baik sebagai warga negara.

Materi dalam pembelajaran ini juga menekankan pentingnya upaya untuk menghilangkan perilaku negatif, sehingga siswa mampu mengenali berbagai cara untuk melawan tindakan penghinaan. Selain itu, guru juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga martabat dan menghormati orang lain. Dengan cara ini, siswa akan memahami pentingnya menolak segala bentuk penghinaan. Melalui Pendidikan Pancasila, siswa juga diajak untuk mengembangkan kreativitas dan sikap yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara efektif melalui pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan nilai-nilai karakter antikorupsi. Dengan melibatkan berbagai masyarakat, program ini berhasil mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat,

⁷ Mursal Aziz dkk, Kartun Sebagai Media Pembelajaran Akhlakul Karimah Anak Usia Dini, Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vo.6, No.1, 2024

khususnya generasi muda, terhadap korupsi. Metode PENETRASI yaitu metode penanaman sembilan nilai karakter antikorupsi. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, keadilan, kerja keras, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, dan disiplin. Metode PENETRASI menjadi model yang inovatif dan relevan untuk diterapkan di tingkat komunitas lainnya dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akar.⁸

IV. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi di sekolah dasar merupakan upaya strategis untuk membentuk generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan mengenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui integrasi kurikulum, metode pengajaran interaktif, dan kerja sama antara sekolah serta orang tua, siswa dapat memahami dampak buruk korupsi dan pentingnya bertindak etis. Implementasi kebijakan seperti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan dan Peraturan Walikota Banjarbaru menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan budaya antikorupsi. Pendekatan yang melibatkan aktivitas praktis, seperti permainan edukatif dan refleksi moral, serta kolaborasi komunitas, memperkuat penanaman nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan keberanian. Dengan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi.

⁸ Dina Wahyu Pritaningtias dkk, *Implementation of Anti-Corruption Education through PENETRASI (Penanaman Sembilan Nilai Karakter Anti Korupsi) Method for the Urban Village Community of Jabungan*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol.1, No.1, 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Riyadi, Imam dkk. *Penanaman Budaya Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.2, 2024
- GINANJAR, DENDA dkk. *Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities*, Veteran Law Review, Vol.6, No.2, 2023
- Hidayat, Ujang Syarip. *Implementation of Honesty Canteen Program As Character Education Strategy in Elementary Schools*, Baileo: Jurnal Sosial Humaniora, Vol.1, No.3, 2024
- Abdurohim, Nandang dkk. *Implementation of Anti-Corruption Education of the PKn Subjects in Project Citizen-Based Learning*, Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, Vol.4, No.1, 2023
- Putri, Shelly Nasya dkk. *Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi*, Siyazah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.2, 2024
- Rachman, Maman dkk. *Effective Communication Strategies between Teachers and Parents through a Collaborative Approach to Improve Student Achievement in Primary Schools*, Jurnal Dirosah Islamiyah (Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor), Vol.6, No.3, 2024
- Aziz, Mursal dkk. *Kartun Sebagai Media Pembelajaran Akhlakul Karimah Anak Usia Dini*, Pelangi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vo.6, No.1, 2024
- Pritaningtias, Dina Wahyu dkk. *Implementation of Anti-Corruption Education through PENETRASI (Penanaman Sembilan Nilai Karakter Anti Korupsi) Method for the Urban Village Community of Jabungan*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol.1, No.1, 2019